



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNAN FAJRI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 417902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Bangunan Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 21250 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.500.000

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T / SOLO Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO K1HO2N14LO A/T Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 666.035.145

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.140.535.145

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.140.535.145

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.